

PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019

Pontianak (29/06/20) - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019 pada 13 entitas pemeriksaan pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK Kalbar. Acara dilaksanakan secara daring (*online*) melalui *Video Conference* dengan mengundang Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari 13 entitas yang terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Kayong Utara. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan**, didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Aan Hayatullah, Kepala Sub Auditorat Kalbar I, **Lukman Rudianto Lumbang Tobing**, dan Kepala Sub Auditorat Kalbar II, **Agvita Windiadi** serta para Pemeriksa Madya di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan mulai April 2020 secara *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO).

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK menyampaikan tiga buah buku laporan yang terdiri dari 1) laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan, 2) laporan hasil pemeriksaan terkait dengan pengendalian internal dan 3) laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam upaya

penyempurnaan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 13 entitas, terdapat 12 entitas yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu entitas yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Kayong Utara.

Pencapaian opini WTP tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah beserta jajaran OPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Pengelolaan aset di pemda yang belum memadai;
2. Pengelolaan Persediaan yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya;
3. Pencatatan Piutang pajak dan retribusi daerah yang tidak tertib.

Begitu pula dengan entitas yang mendapat opini WDP. Permasalahan pokok yang menjadi pengecualian opini adalah pencatatan aset tetap dan aset lainnya yang kurang memadai, diantaranya aset tetap yang masih dicatat secara gabungan, aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya, akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak didukung dengan rincian perhitungan yang valid, dan aset lain-lain yang tidak didukung dengan rincian yang valid.

SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR